

ABSTRAK

Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki potensi besar di bidang perikanan karena lokasinya dekat dengan perairan. Oleh karena itu, Daerah ini merupakan penghasil ikan sehingga di dalam penangkapan ikan harus dilakukan pemantauan oleh Tim Satuan Polisi Air sebab masih banyak penangkapan ikan dengan cara ilegal ataupun merusak lingkungan di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum, Memahami kendala polisi perairan dalam melakukan penegakan hukum, Dan menjelaskan upaya polisi perairan untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh polisi perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Melalui pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan berasal dari undang-undang, Buku, Jurnal, dan Internet. Data lapangan berasal dari wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan temuan penelitian, Dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut yaitu dengan diberikan sanksi hukum jika perbuatan berat pelaku ditangkap dan ditahan serta diberi hukuman sesuai undang-undang, Jika ringan pelaku diberi peringatan serta menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Kendalanya adalah kurangnya dana operasional, peralatan dan personil, kurangnya koordinasi antar instansi, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan alat penangkapan ikan. Sedangkan upaya mengatasinya adalah dengan cara merincikan dana dengan baik, melakukan patroli dengan peralatan seadanya, memastikan efisiensi yang optimal dari personil, serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Penangkapan Ikan Merusak Ekosistem, Polisi Perairan